# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian yang diambil dari bab Iv, ialah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembayaran perkir non tunai yang berada di Taman Bungkul Kota Surabaya dilihat dari dimensi Komuniskasi, dimana dilihat dari segi implementor dan metode yang yang digunakan dalam menyampaikan program kepada masayarakat. Dari sisi impelemetor atau pelaksanan kebijakan merupakan warga surabaya yang sedang berkunjung di Taman Bungkul Kota Surabaya yang dibantu oleh tenaga parkir atau juru parkir dalam penerapannya. Sedangkan dilihat dari penyampaian program atau metode sosialisasi yang digunakan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya memanfaatkan dua media, yang pertama media online melalui berita-berita dank anal youtube yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kedua melaui terjun langsung dilapangan yaitu melalui du agenda kegaian sosialisasi dengan menerjunkan petugas dishub selama satu minggu, dan di akhiri dengan program peresmian penggunaan parkir meter oleh wali kota Surabaya Ibu Tri Risma Harini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui dimensi komunikasi implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai terlah terimplementasi dengan baik.

2. Implementasi kebijakan pembayaran perkir non tunai yang berada di Taman Bungkul Kota Surabaya dilihat dari dimensi Sumberdaya. Dimana aspek yang menjadi kajian yaitu kemampuan impelementor dilihat dari tingkat pendidikan, dan kemampuan pemahaman dari tujuan program serta ketersedian saran prasarana. Dilihat dari aspek kemampuan implementor dalam hal ini kemepuan tenaga parkir atau juru parkir dimana tenaga juru parkir telah diberikan pembekalan sebelum penerapan parkir non tunai bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang disampaikan langsung oleh kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sedangkan guna mempermudah penggunaan parkir non tunai, setiap juru parkir dilengkapi dengan kartu e-money atau bisa juga e-toll pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah tenaga juru parkir yang ada di Taman Bungkul Kota Surabaya sebanyak 30 orang dengan pendidikan belum sarjana, yaitu SMA sebanyak 18 orang, SMP sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 2 orang. Sedangkan jumlah mesin parkir yang ada di sekitar area Taman Bungkul sebanyak 10 buah, dimana semua beroperasi dengan baik, hanya saja mesin parkir masih lambat dalam pengoperasian, sehingga perlu pembaharuan mesin parkir yang lebih cepat. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai di Taman Bungkul Kota Surabaya dilihat dari dimensi Sumberdaya sudah terimplementasi, namun kurang maksimal.
3. Implementasi kebijakan pembayaran perkir non tunai yang berada di Taman Bungkul Kota Surabaya dilihat dari dimensi Disposisi. Dimana

aspek yang menjadi acuan yaitu tingkat kejujuran dari implementor atau juru parkir dalam menerapkan peraturan-peraturan yang beriaktan dalam pembayaran parkir non tunai. Telah terdapat besaran retribusi yang dibayarkan berdasarkan jenis kendaraan pengunjung. Namun pada penerapannya masih terdapat oknum juru parkir yang melanggar atau tidak sesuai dengan besaran retribusi yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari aspek Disposisi pada implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai di Taman Bungkul belum maksimal atau belum terimplementasi dengan baik.

4. Implementasi kebijakan pembayaran perkir non tunai yang berada di Taman Bungkul Kota Surabaya dilihat dari dimensi struktur organisasi. Aspek yang menjadi acuan yaitu ketersedian standar oprasional prosedur. Standar oprasioanl prosedur guna mendukung terimplementasinya kebijakan pemabayaran parkir non tunai di Taman Bungkul Kota Surabaya sudah terdapat SOP yang terletak pada setiap mesin, sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam pengoprasian. Sehingga dapat disimpukan bahwa implementasi kebijakan pembayaran parkir non tunai di Taman Bungkul Kota Surabaya dari aspek struktur organisasi telah terimplementasi dengan baik.
5. Implementasi kebijakan Pembayaran parkir non tunai yang ada di Taman Bungkul Kota Surabaya, masih belum maksimal, hal ini dilihat dari sumberdaya berupa mesin pembayaran parkir masih relatif lama dalam

pengoperasian, serta dari segi tenaga juru parkir masih terdapat oknum yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, dalam rangka sebagai bentuk kepedulian penulis dalam penerapan kebijakan tersebut yiatu:

1. Guna memberikan kecepatan dalam pelayanan, maka pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sebaiknya mengupgraide mesin parkir ke yang lebih cepat.
2. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal dari segi tenaga juru parkir, yang melanggar ketentuan sebaiknya untuk segera menindak dan melakukan pengawasan secara berkala agar kecurangan atau oknum dari Juru parkir yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pengguna untuk segera dilakukan penindakan.